

Memanusiakan Pahlawan Devisa: Pemberdayaan dan Advokasi Komunitas Migran Indonesia di Malaysia

Suhada* , Fahmy Akbar Idries, Rifqi Syarif Nasrulloh, Novi Diah Wulandari

Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding author: suhada@unu-jogja.ac.id

Abstrak

Kajian dalam kegiatan pengabdian ini membahas tantangan dan kebutuhan buruh migran Indonesia di Malaysia, yang menghadapi berbagai masalah seperti kondisi kehidupan yang tidak layak, akses kesehatan yang terbatas, kurangnya pendidikan, dan perlindungan hukum yang tidak memadai. Faktor-faktor seperti kesenjangan upah dan ketersediaan pekerjaan di dalam negeri mendorong migrasi ke negara tetangga, namun kurangnya keterampilan sering menyebabkan masalah serius seperti pekerjaan yang tidak sesuai harapan, perdagangan manusia, dan buruh ilegal. Pengabdian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan awal dalam pembinaan komunitas migran internasional dari Indonesia di Malaysia, dengan melibatkan sinergi antara kampus-kampus di Indonesia dan pelajar internasional di Malaysia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui wawancara dan Focus Group Discussion (FGD) dengan buruh migran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak migran tinggal di tempat yang tidak layak dengan akses terbatas ke air bersih dan sanitasi. Mereka juga menghadapi hambatan dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan untuk anak-anak, dan perlindungan hukum yang memadai. Rekomendasi mencakup perbaikan kondisi perumahan, peningkatan akses kesehatan, pendidikan formal bagi anak-anak migran, perlindungan hukum, dan pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan kewirausahaan dan manajemen keuangan. Kolaborasi antara pemerintah, LSM, perguruan tinggi, dan komunitas lokal sangat penting untuk mencapai pembinaan yang efektif dan kesejahteraan yang lebih baik bagi para migran.

Kata kunci: Komunitas Migran Indonesia; Pekerja Migran; Peran Universitas

Abstract

This study addresses the challenges and needs of Indonesian migrant workers in Malaysia, who encounter issues such as poor living conditions, limited healthcare access, inadequate education, and insufficient legal protection. Wage disparities and job availability in Indonesia drive migration to neighboring countries, but a lack of skills often results in serious problems like job mismatches, human trafficking, and illegal labor. The aim of this community services is to identify the initial needs for developing the Indonesian international migrant community in Malaysia, with synergy between Indonesian universities and international students in Malaysia. The study employs a qualitative approach through interviews and Focus Group Discussions (FGD) with migrant workers. Findings indicate that many migrants live in inadequate housing with limited access to clean water and sanitation. They also face significant barriers to accessing healthcare, education for their children, and legal protection. Recommendations include improving housing conditions, enhancing healthcare access, providing formal education for migrant children, ensuring legal protection, and promoting economic empowerment through entrepreneurship and financial management training. Effective development and improved welfare for migrants require collaboration between the government, NGOs, universities, and local communities

Keywords: Indonesia Migrant Community; Migrant Worker; University role

Pendahuluan

Issue buruh migran selalu menjadi issue yang manrik sejak dasawarsa ini. Gap upah dan ketersediaan lapangan kerja didalam negeri dengan negeri sekitar membuat tingginya minat para pekerja dari Indonesia melakukan migrasi kebeberapa negara tetangga (Testaverde et al., 2017). Kekurangan skill atau kompetensi sampai dengan dengan kurangnya orientasi lapangan sering menyebabkan permasalahan akut setelah para para pekerja migran sudah sampai dilokasi negara tujuan. Mulai dari ketidak sesuaian dengan harapan pekerjaan yang tidak sesuai (Iredale, 1999), kasus human trafficking sampai dengan menjamurnya buruh illegal yang terpaksa tetap harus bekerja dinegara tujuan dengan segala konsekwensi dinegara tujuan. Beberapa peneliti juga yang secara khusus menyoroti tentang kasus human trafficking disebutkan bahwa Perdagangan manusia menjadi isu sentral di era globalisasi karena merupakan epidemi di berbagai negara (Nugrahaningsih et al., 2020). Kasus perdagangan manusia telah marak sejak lama di Indonesia (Internationale Arbeitsorganisation & Internationale Arbeitsorganisation, 2021).

Disisi lain bahwa buruh imigran dari Indonesia dari negara tetangga juga harus diakui sebagai bagian dari konsekwensi global tetapi juga membawa konsekwensi yang harus diantisipasi (Segal, 2019). Sebagai contohnya maraknya para pekerja migran Indonesia yang mencari peruntungan di negeri jiran (Malaysia). Begitunya banyaknya fakta para buruh yang terlantar termasuk keluarga juga menjadikan keprihatinan tersendiri. Para pekerja migran secara sadar telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat Indonesia, sebut sebagai saja sebagai pahlawan devisa yang meyelamatkan atas potensi defisit transaksi berjalan negeri ini (Maksum, 2021). Realitas ini menuntut perhatian serius terutama terkait pembinaan komunitas migran internasional dari Indonesia di Malaysia.

Salah satu permasalahan yang dihadapi Malaysia terkait dengan permasalahan buruh imigran adalah adanya keterbatasan akses Pendidikan terhadap anak-anak atau keluarganya, serta Pendidikan persiapan pasca menjadi buruh migran dan Kembali ke tanah air. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan identifikasi kebutuhan awal pembinaan komunitas migran internasional dari Indonesia yang berada di Malaysia dalam kegiatan yang dapat sinergi dengan kampus-kampus di Indonesia dan pelajar Internasional Indonesia yang ada di Malaysia.

Pembinaan komunitas migran di Malaysia tidak bisa hanya difokuskan pada aspek ekonomi semata. Kesejahteraan sosial dan perlindungan hak asasi manusia adalah bagian integral dari proses pembinaan. Kondisi kehidupan para migran, termasuk perumahan, kesehatan, dan pendidikan, perlu diberikan perhatian serius. Perlindungan hak asasi manusia bagi para migran merupakan tanggung jawab bersama yang harus diterapkan oleh pemerintah setempat (Crépeau & Atak, 2016)(Oomen & Baumgärtel, 2018)(Castles, 2011).

Penting untuk diakui bahwa para migran Indonesia memiliki peran strategis di sektor-sektor kritis Malaysia seperti konstruksi, pertanian, dan perawatan Kesehatan (Prianto et al., 2023). Poin ini terbukti dalam penelitian oleh IOM (*International Organization for Migration*) yang menyatakan bahwa kontribusi migran tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga

memainkan peran penting dalam pembangunan sektor-sektor yang mendukung ekonomi Malaysia secara keseluruhan (IOM, 2020)(Scholten, 2022).

Di tengah peran dan kontribusinya pada negara, mereka juga menghadapi tantangan dan permasalahan yang tidak mudah. Mulai dari upah yang tidak dibayar hingga permasalahan perizinan. Perlindungan hukum bagi para migran Indonesia di Malaysia menjadi landasan yang krusial. Aspek ini melibatkan keamanan dokumen resmi para pekerja migran. Sebagai contoh, menurut Amnesty International, pendaftaran dan pemenuhan persyaratan hukum harus diawasi secara ketat untuk mencegah eksploitasi dan perlakuan yang tidak adil (Extending Social Protection to Migrant Workers, Refugees and Their Families, 2021).

Dalam konteks ini, keterlibatan pemerintah Indonesia, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan kaum intelektual yang tersebar di berbagai perguruan tinggi baik di Malaysia maupun luar Malaysia menjadi sangat penting. Pemerintah perlu mengambil peran aktif dalam menyediakan perlindungan dan fasilitas yang mendukung kehidupan para migran, sesuai dengan amanat UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Pemerintah Indonesia, 2017) Di samping itu, LSM dapat membantu dalam pemantauan dan advokasi hak-hak migran.

Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Pengabdian dilakukan dengan cara melakukan FGD dan Wawancara;

1. **Focus Group Discussion (FGD):** FGD dilakukan bersama para buruh migran yang dilakukan dengan Sarekat pekerja Migran Indonesia di Malaysia.
2. **Wawancara:** wawancara dilakukan terhadap beberapa buruh migran yang hadir dalam acara untuk memahami lebih dalam keluhan dan permasalahan yang dihadapi oleh mereka hingga mewawancarai bentuk pekerjaan yang mereka jalani, peluang dan tantangan.



Gambar 1. Dokumentasi FGD dengan para pekerja migran



Gambar 2. Dokumentasi kunjung dan diskusi dengan pelaku Pemberdayaan pekerja migran Di Malaysia

Pembahasan

Hasil identifikasi awal akan kebutuhan tenaga pekerja migran yang telah dilakukan dengan metode FGD dan wawancara (Gambar 1 dan 2) dengan para pekerja migran di Malaysia telah berhasil mengidentifikasi kebutuhan para pekerja migran. Berdasarkan FGD yang difasilitasi oleh pembina komunitas migran internasional di Malaysia teridentifikasi kebutuhan awal untuk memastikan upaya pembinaan dapat berjalan dengan efektif. Beberapa issue yang muncul di antaranya adalah kondisi kehidupan meliputi tempat tinggal, akses Kesehatan, hak-hak mendapatkan akses Pendidikan, perlindungan hukum, pemberdayaan ekonomi dan bidang Pendidikan.

1. Kondisi tempat tinggal dan akses kesehatan

Kehidupan para migran sering kali jauh dari kondisi ideal. Banyak dari mereka tinggal di tempat yang tidak layak dengan fasilitas dasar yang minim. Menurut laporan International Labour Organization (ILO), pekerja migran sering mengalami kondisi tempat tinggal yang buruk, dengan akses terbatas terhadap air bersih dan sanitasi yang memadai. Hal tersebut pada kegiatan FGD dengan paruh buruh migran yang difasilitasi oleh syarekat pekerja. Hal senada dalam penelitian penelitian lain disampaikan bahwa keamanan tempat tinggal mereka sering tidak terjamin, membuat mereka rentan terhadap berbagai ancaman seperti kekerasan dan pencurian. Kondisi ini sering dialami oleh pekerja migran tidak resmi (Safitri & Wibisono, 2023). Terjadinya buruh migran ilegal

dapat disebabkan karena ketidakmampuan memperpanjang izin tinggal yang dianggap mahal maupun karena faktor lainnya.

Akses terhadap layanan kesehatan merupakan kebutuhan fundamental bagi setiap individu, termasuk para buruh migran di Malaysia. Namun demikian, para pekerja migran sering kali dihadapkan pada berbagai hambatan signifikan dalam memperoleh layanan kesehatan yang memadai. Hambatan-hambatan ini mencakup biaya yang tinggi, diskriminasi, dan kurangnya informasi mengenai hak-hak kesehatan mereka, yang juga terjadi pada para buruh informal di dalam negeri juga (Satriawan et al., 2021). Menurut laporan World Health Organization (WHO), pekerja migran kerap kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan dasar, yang secara signifikan berdampak negatif pada kesejahteraan fisik dan mental mereka (Adara, 2023).

2. Kondisi pendidikan anak buruh migran

Pendidikan merupakan hak fundamental yang seharusnya dijamin bagi setiap anak, termasuk anak-anak migran. Namun, kenyataannya banyak dari mereka tidak dapat menikmati pendidikan formal akibat status yang tidak berdokumen atau diskriminasi (Cicilia Anggi Sholina, 2022). Berdasarkan wawancara dan FGD mengkonfirmasi bahwa anak-anak pekerja migran yang tidak mendapatkan akses pendidikan umumnya berasal dari keluarga dengan orang tua yang bekerja secara ilegal. Hal ini terjadi baik karena sejak awal mereka tidak memiliki izin atau karena ketidakmampuan untuk membayar perpanjangan izin akibat upah yang tidak mencukupi. Fakta mengungkapkan bahwa hampir 50% pekerja migran Indonesia di Malaysia tidak memiliki izin resmi. Situasi ini memperparah ketidakadilan dan mempertegas urgensi tindakan nyata untuk menjamin hak pendidikan bagi semua anak, termasuk anak-anak migran. Artinya hal tersebut masih senada dengan Laporan UNESCO, bahwa anak-anak migran sering kali menemui berbagai hambatan dalam mengakses pendidikan, seperti kendala bahasa, ketiadaan dokumen resmi, dan diskriminasi. Ketidakmampuan mengakses pendidikan ini tidak hanya membahayakan masa depan mereka, tetapi juga menghambat kemampuan mereka untuk berintegrasi secara sosial dan ekonomi di negara tuan rumah (UNESCO, 2021). Kondisi ini menjadi peluang badi vivitas academia di Indonesia termasuk para pelajar Indonesia untuk melakukan kegiatan pengabdian Masyarakat dalam hal pembinaan atau pengajaran pada anak-anak migran yang selama ini anak-anak belajar di tempat penampungan sementara atau selter.

3. Kondisi Hak atas perlindungan Hukum.

Dalam wawancara hal ini terungkap bahwa pekerja migran asal Magetan waktu awal-awal masuk kerja pabrik di salah satu negara bagian selama 4 bulan tidak mendapatkan upah karena sudah diminta semuanya oleh calo pekerja migran. Dengan demikian untuk kebutuhan makan dan kebutuhan sehari-hari harus mencari pekerjaan sampingan. Contoh ini mengindikasikan perlunya adanya pendidikan hukum disisi lain juga pemerintah perlu memberikan perlindungan hukum. Dari sisi perguruan tinggi dapat memberikan pembinaan tentang aspek hukum

dan regulasi kepada para pekerja migran Perlindungan hukum adalah aspek penting yang harus diperhatikan dalam pembinaan komunitas migran. Hal terkonfirmasi dalam sebuah penelitian yang menyatakan banyak pekerja migran yang tidak memiliki dokumen resmi, membuat mereka rentan terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan. Menurut Amnesty International, para pekerja migran sering kali mengalami eksploitasi oleh majikan, termasuk upah yang tidak dibayar, jam kerja yang panjang (Pangsapa, 2015), dan kondisi kerja yang berbahaya. Penting untuk memastikan bahwa para pekerja migran memiliki dokumen resmi dan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai untuk melindungi hak-hak mereka (Foley & Piper, 2021).

4. Pemberdayaan Ekonomi.

Berdasarkan wawancara responden menyatakan Pemberdayaan ekonomi adalah elemen penting dalam pembinaan komunitas migran (Tandos, 2022). Memberikan pelatihan dan pendidikan tentang manajemen keuangan dan kewirausahaan dapat membantu para migran untuk mengelola pendapatan mereka dengan lebih baik dan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang lebih stabil. Hal tersebut juga terkonfirmasi dalam laporan dari International Organization for Migration (IOM), program pelatihan kewirausahaan dan manajemen keuangan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi para migran dan membantu mereka untuk berintegrasi lebih baik di masyarakat (Saleh et al., 2023). Satu hal yang membuat para pekerja migran tidak mau pulang ke tanah air walau di tengah himpitan ekonomi di negeri orang adalah karena belum adanya kemampuan perencanaan keuangan yang baik dan juga bekal mental serta ketrampilan untuk berwirausaha.

Dengan mengidentifikasi dan menangani kebutuhan-kebutuhan ini, upaya pembinaan komunitas migran dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan para migran. Kolaborasi antara pemerintah, LSM, Perguruan Tinggi, dan komunitas lokal sangat penting untuk mencapai tujuan ini.

Kesimpulan

Pembinaan komunitas migran internasional harus dimulai dengan identifikasi kebutuhan awal untuk memastikan upaya pembinaan yang efektif. Aspek-aspek utama yang perlu diperhatikan meliputi kondisi kehidupan, akses kesehatan, pendidikan, perlindungan hukum, dan pemberdayaan ekonomi. Banyak migran menghadapi tantangan besar dalam hal perumahan yang layak, akses ke layanan kesehatan, pendidikan anak-anak mereka, perlindungan hukum, dan pemberdayaan ekonomi. Untuk mencapai tujuan pembinaan yang efektif, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, LSM, perguruan tinggi, dan komunitas lokal.

Rekomendasi

Pemerintah Indonesia

1. Para pekerja Indonesia dapat bekerja sama dengan Pemerintah Malaysia dan organisasi terkait penyediaan fasilitas perumahan yang

- layak bagi para migran dengan akses yang memadai ke air bersih dan sanitasi.
2. Akses Kesehatan: Diperlukan upaya untuk menghilangkan hambatan biaya, diskriminasi, dan kurangnya informasi agar para migran dapat mengakses layanan kesehatan dasar yang memadai.
 3. Pendidikan untuk Anak Migran : Meningkatkan akses pendidikan formal bagi anak-anak migran dengan mengatasi hambatan bahasa, dokumentasi, dan diskriminasi. Selain itu untuk kondisi darurat bagi anak-anak pekerja migran ilegal yang tinggal penampungan dapat menjadi kontribusi bagi perguruan tinggi dan para pelajar Indonesia di Malaysia melalui program dalam skema pengabdian Masyarakat Internasional.
 4. Pemberdayaan Ekonomi.Menyediakan pelatihan kewirausahaan dan manajemen keuangan bagi para migran untuk membantu mereka mengelola pendapatan dan mempersiapkan masa depan yang lebih stabil.

Perguruan Tinggi dan Lembaga terkait termasuk NGO dalam Skema Program Pengabdian

1. Penyediaan pelatihan dan Pendidikan lietarasi hukum Kesehatan dan dan kerausahaan kepada para pekerja migran
2. Memberikan Pendidikan sebagai guru untuk anak-anak yang tidak mendapatkan akses Pendidikan secara resmi, yang selama ini belajar dalam penampungan

Referensi

- Adara, D. L. (2023). Pendekatan Implementasi Peran International Organization For Migration (Iom) Indonesia Dalam Menangani Perdagangan Manusia Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia Pada Tahun 2018-2021 SKRIPSI.
- Castles, S. (2011). Bringing Human Rights into the Migration and Development Debate: Human Rights, Migration and Development. *Global Policy*, 2(3), 248–258. <https://doi.org/10.1111/j.1758-5899.2011.00116.x>
- Cicilia Anggi Sholina. (2022). Pemenuhan Hak-Hak Asasi Anak Tenaga Kerja Indonesia Di Perkebunan Sawit Di Wilayah Tawau, Sabah, Malaysia. *Jurnal Pembangunan Manusia*, 3(1). <https://doi.org/10.7454/jpm.v3i1.1029>
- Crépeau, F., & Atak, I. (2016). Global Migration Governance: Avoiding Commitments on Human Rights Yet Tracing a Course for Cooperation. *Netherlands Quarterly of Human Rights*, 34(2), 113–146. <https://doi.org/10.1177/016934411603400203>
- Extending Social Protection to Migrant Workers, Refugees and Their Families: A Guide for Policymakers and Practitioners. (2021). International Labour Organisation (ILO).
- Foley, L., & Piper, N. (2021). Returning home empty handed: Examining how COVID-19 exacerbates the non-payment of temporary migrant

- workers' wages. *Global Social Policy*, 21(3), 468–489. <https://doi.org/10.1177/14680181211012958>
- Internationale Arbeitsorganisation & Internationale Arbeitsorganisation (Eds.). (2021). *ILO global estimates on international migrant workers: Results and methodology* (Third edition). ILO.
- Iredale, R. (1999). The Need to Import Skilled Personnel: Factors Favouring and Hindering its International Mobility. *International Migration*, 37(1), 89–123. <https://doi.org/10.1111/1468-2435.00067>
- Maksum, A. (2021). Indonesian post-migrant workers: A challenging problem for human security. *Social Sciences & Humanities Open*, 4(1), 100223. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2021.100223>
- Nugrahaningsih, N., Alunaza, H., & Lutfie, R. Z. (2020). The Role of International Organization for Migration in Handling Human Trafficking in Sambas Regency, West Kalimantan Province. *Jurnal Hubungan Internasional*, 9(1). <https://doi.org/10.18196/hi.91163>
- Oomen, B., & Baumgärtel, M. (2018). Frontier Cities: The Rise of Local Authorities as an Opportunity for International Human Rights Law. *European Journal of International Law*, 29(2), 607–630. <https://doi.org/10.1093/ejil/chy021>
- Pangsapa, P. (2015). When Battlefields become Marketplaces: Migrant Workers and the Role of Civil Society and NGO Activism in Thailand. *International Migration*, 53(3), 124–149. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2435.2009.00559.x>
- Pemerintah Indonesia. (2017). "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 201 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- Prianto, A. L., Amri, A. R., & Ajis, M. N. (2023). Governance and Protection of Indonesian Migrant Workers in Malaysia. *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 7(2), 214. <https://doi.org/10.19184/jseahr.v7i2.44185>
- Safitri, D., & Wibisono, A. A. (2023). Keamanan Manusia Pekerja Migran Indonesia: Ketidakamanan dan Perlindungannya. *Intermestic: Journal of International Studies*, 7(2), 741. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v7n2.17>
- Saleh, R., Adnan, R. S., & Raharto, A. (2023). Pemberdayaan komunitas purna Pekerja Migran Indonesia melalui organisasi berbasis komunitas Forum Warga Buruh Migran. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 17(2), 219. <https://doi.org/10.14203/jki.v17i2.754>
- Satriawan, D., Pitoyo, A. J., & Giyarsih, S. R. (2021). Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepemilikan Jaminan Kesehatan Pekerja Sektor Informal di Indonesia. *TATALOKA*, 23(2), 263–280. <https://doi.org/10.14710/tataloka.23.2.263-280>
- Scholten, P. (Ed.). (2022). *Introduction to Migration Studies: An Interactive Guide to the Literatures on Migration and Diversity*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-92377-8>

- Segal, U. A. (2019). Globalization, migration, and ethnicity. *Public Health*, 172, 135–142. <https://doi.org/10.1016/j.puhe.2019.04.011>
- Tandos, R. (2022). Developing A Model for Women Economic Empowerment for Indonesian Former Migrant Workers. *Asian Social Work Journal*, 7(4), 23–38. <https://doi.org/10.47405/aswj.v7i4.219>
- Testaverde, M., Moroz, H., Hollweg, C. H., & Schmillen, A. (2017). Migrating to opportunity: Overcoming barriers to labor mobility in Southeast Asia. World Bank Group. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1106-7>
- UNESCO. (2021). Global Education Monitoring Report 2021/2: Non-state actors in education: Who chooses? Who loses? UNESCO. <https://doi.org/10.54676/XJFS2343>.